

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Kebijakan Publik**

Menurut R. Dye (2012:14) kebijakan publik merupakan “*Whatever governments choose to do or not to do*” (pilihan tindakan apapun yang dilakukan oleh pemerintah)

Robert Eyestone (2014:6) mendefinisikan kebijakan publik adalah sebagai hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya.

Heinz ealau dan Kenneth prewitt (2014:6) perspektif mereka mendefinisikan kebijakan publik adalah “keputusan tetap” yang dicirikan dengan konsistensi dan pengulangan (repetisi) tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut.

Richard Rose (2014:7) mendefinisikan kebijakan publik sebagai sebuah rangkaian panjang dari banyak atau sedikit kegiatan yang saling berhubungan dan memiliki konsekuensi bagi yang berkepentingan sebagai keputusan yang berlainan.

Kebijakan publik merupakan keputusan politik yang dikembangkan oleh badan dan pejabat pemerintah. karena itu karakteristik khusus dalam kebijakan publik adalah bahwa keputusan tersebut dirumuskan sebagai otoritas oleh sistem politik, yaitu para senior, kepala tertinggi, eksekutif, legislatif, para hakim, administrator, penasehat par raja dan sebagainya.

Menurut James E. Anderson yang dikutip leo agustino (2014:7) kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud/tujuan tertentu yang

diikuti dan dilakukan oleh seorang actor atau sekelompok actor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan.

Dalam buku Leo Agustino (2014:8) yang berkaitan dengan definisi-definisi tersebut di atas maka dapat disimpulkan beberapa karakteristik utama dari suatu definisi kebijakan publik.

1. Pada umumnya kebijakan publik ditujukan pada tindakan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu dari pada perilaku yang berubah atau acak.
2. Kebijakan publik pada dasarnya mengandung bagian atau pola kegiatan yang dilakukan oleh para pejabat pemerintah dari pada keputusan yang terisah-pisah.
3. Kebijakan publik merupakan apa yang sesungguhnya dikerjakan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengontrol inflasi atau menawarkan perumahan rakyat, bukan apa maksud yang dikerjakan atau yang akan dikerjakan.
4. Kebijakan publik dapat berbentuk positif maupun negative.
5. Kebijakan publik, paling tidak secara positif, di dasarkan pada hukum dan merupakan tindakan hukum yang bersifat memerintah.

Tahap-tahap kebijakan publik

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena

itu beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik. Namun demikian beberapa ahli membagi tahap-tahap ini dengan urutan yang berbeda-beda, proses-proses kebijakan publik menurut William dunn sebagaimana dikutip Dwiyanti Indiahono (2009:20) yaitu :

- a. Penyusunan agenda
- b. formulasi Kebijakan publik
- c. Adopsi Kebijakan
- d. Implementasi Kebijakan
- e. Penilaian Kebijakan

## **2.2. Implementasi Kebijakan**

Implementasi kebijakan merupakan aspek yang sangat penting dalam seluruh proses kebijakan karena kebijakan publik yang telah dibuat akan bermanfaat bila diimplementasikan. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi dipandang sebagai proses interaksi antara suatu perangkat tujuan dan tindakan yang mampu untuk mencapai tujuan kebijakan. Dimana di dalam implementasi kebijakan aktor, organisasi, prosedur dan teknik secara bersama dan simultan.

Daniel Mazmanian dan paul Sabatier (2014:139) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai pelaksana keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan.

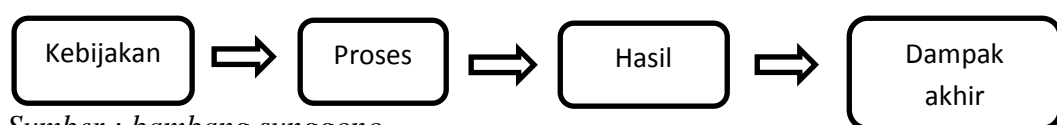
Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya.

Van Meter dan Van Horn (2014:139) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.

Menurut Bambang Sugono menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan – tujuan tertentu dengan sarana – sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu.

Chief J. O. Udoji (2014:140) mengatakan pelaksanaan kebijakan adalah pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu hal penting bahkan mungkin jauh lebih penting dari pada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan akan berupa impian atau rencana bagus yang resimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan.

Proses implementasi kebijakan publik baru dapat dimulai apabila tujuan kebijakan publik telah ditetapkan, program – program telah dibuat dan dana telah dialokasikan untuk pencapaian kebijakan tersebut. Suatu implementasi dapat digambarkan secara sistematis seperti : Proses implementasi



Sumber : bambang sungono

Dari skema diatas terlihat bahwa proses implementasi dimulai dengan suatu kebijakan yang harus dilaksanakan. Hasil proses implementasi terdiri dari hasil kebijakan yang segera atau disebut "*policy performance*".

Menurut Edward III, (2009:31-32) implementasi kebijakan merupakan proses yang krusial karena seberapa baiknya suatu kebijakan kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan dengan baik implementasinya, maka apa yang terjadi menjadi tujuan kebijakan publik tidak akan terwujud. Begitu pula sebaliknya, bagaimana baiknya persiapan dan perencanaan implementasi kebijakan, kalau kebijakannya tidak dirumuskan dengan baik apa yang menjadi tujuan kebijakan juga tidak bisa dicapai. Oleh karena itu untuk mencapai tujuan kebijakan perumusan kebijakan dan implementasi harus dipersiapkan dan direncanakan dengan baik. Edward juga menyatakan bahwa ada 4 (empat) model dalam implementasi kebijakan yaitu :

a. komunikasi

komunikasi merupakan faktor yang sangat penting karena komunikasi berkaitan dengan penyampaian informasi, ide, keterampilan, peraturan dan lain – lain. Dengan menggunakan sarana tertentu kepada pihak yang berhak menerimanya. Implementasi kebijakan akan berjalan efektif bila mereka yang merasakan keputusan mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Komunikasi harus akurat dan harus dimengerti dengan cepat oleh pelaksana. Komunikasi merupakan tolak ukur seberapa jauh kebijakan dalam bentuk suatu peraturan telah disampaikan secara jelas dengan interpretasi yang sama dan dapat dilakukan secara konsisten dengan aparat pelaksanaan peraturan tersebut.

## b. Sumber Daya.

Implementasi mungkin diteruskan dengan cermat, jelas dan konsisten, namun jika para pelaksana kekurangan sumber-sumber yang diperlukan untuk melakukan kebijakan maka implementasi cenderung tidak berjalan. Sumber-sumber yang penting meliputi :

### 1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia sebagai pelaksanaan kebijakan, dimana sumber daya manusia tersebut memiliki jumlah yang cukup dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan kebijakan maksudnya adalah para pelaksana yang berjumlah cukup dan memiliki kemampuan dan keterampilan yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan.

### 2. Kewenangan

Kewenangan dalam sumber daya adalah kewenangan yang dimiliki oleh sumber daya manusia untuk melaksanakan suatu kebijakan yang ditetapkan. Kewenangan yang dimiliki oleh sumber daya manusia adalah kewenangan setiap pelaksanaan untuk melakukan hal – hal yang berkaitan apa yang diamanatkan dalam suatu kebijakan.

### 3. Informasi

Informasi merupakan sumber penting dalam implementasi kebijakan. Informasi untuk melaksanakan kebijakan disini adalah segala keterangan dalam bentuk tulisan atau pesan, pedoman, petunjuk dan tata cara pelaksanaan yang bertujuan untuk melaksanakan kebijakan tersebut

#### 4. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana dalam sumber daya adalah semua sarana dan prasarana yang tersedia demi terselenggaranya pelaksanaan suatu kebijakan dan dipergunakan untuk mendukung secara langsung dan terkait dengan tugas – tugas yang ditetapkan.

#### c. Sikap

Sikap disini adalah sikap para pelaksana yang mendukung pelaksanaan suatu kebijakan yang telah ditetapkan. Sikap para pelaksana dalam kesediaan menerima dan melaksanakan suatu kebijakan tanpa suatu paksaan merupakan keberhasilan dalam melaksanakan suatu kebijakan.

#### d. Strukur Birokrasi

Birokrasi merupakan salah satu unsur dalam implementasi kebijakan. Menurut Edward III, ada 2 karakteristik utama dalam birokrasi yaitu prosedur kerja baku standard atau *standard operating procedure* (SOP) dan fragmentasi. *Standard operating procedure* berkembang sebagai tanggapan internal terhadap waktu yang terbatas dan sumber dari para pelaksana serta keinginan untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi yang kompleks dan tersebar luas. Karakteristik yang kedua adalah fragmentasi yaitu penyebaran tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas yang melibatkan unit diluar organisasi tanpa adanya tumpang tindih dengan tetap mencakup pembagian tugas secara menyeluruh dalam melaksanakan suatu kebijakan.

### **2.3. Sistem Pendidikan Nasional**

Pengertian sistem pendidikan Nasional menurut Undang-Undang No. 20 tahun 2003 pasal 1 ayat 3 adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban Bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan Bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Dalam Undang-Undang No.20 tahun 2003 juga menyatakan sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen kehidupan lokal, nasional dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah dan berkesinambungan.

Prinsip penyelenggaraan pendidikan nasional menurut Undang-Undang No. 20 tahun 2003 pasal 4 adalah :

1. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan nilai kemajukan Bangsa.
2. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematis dengan sistem terbuka dan multimakna



3. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
4. Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreatifitas peserta didik dalam proses pembelajaran
5. Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat
6. Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaran dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

Standar nasional pendidikan menurut Undang-Undang No. 20 tahun 2003 adalah :

1. Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara terencana dan berkala
2. Standar nasional pendidikan nasional digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan
3. Pengembangan standar nasional pendidikan serta pemantauan dan pelaporan pencapaiannya secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan standarisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan

4. Ketentuan mengenai standar nasional pendidikan sebagai mana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) , dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

#### **2.4. Pengertian Kurikulum**

Kurikulum berasal dari bahasa latin *currere* yang berarti berlari cepat, maju dengan cepat, menjalani dan berusaha untuk.

Pengertian kurikulum menurut Undang-Undang No. 20 tahun 2003 adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

Beberapa pengertian kurikulum yang termuat di website.

Pengertian kurikulum menurut Olivia adalah seperangkat pendidikan yang merupakan jawaban terhadap kebutuhan dan tantangan masyarakat.

Penegetian kurikulum menurut Kerr. J. F kurikulum adalah semua pembelajaran yang dirancang dan dilaksanakan secara individu ataupun secara kolompok, baik disekolah maupun diluar skeolah.

Pengertian kurikulum menurut Neagley dan Evans adalah semua pengalaman yang dirancang dan dikemukakan oleh pihak sekolah.

Pengertian kurikulum menurut Good V. Carter adalah kumpulan kursus ataupun urutan pelajaran yang sistematik.

Menurut Hamalik, kurikulum adalah sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh dan dipelajari oleh siswa untuk memperoleh sejumlah pengetahuan.

Menurut Nasution kurikulum adalah segala usaha sekolah untuk mempengaruhi anak belajar apakah dalam ruang kelas, di halaman sekolah ataupun diluar sekolah termasuk kurikulum.

Menurut Saylor, Alexander dan Lewis yang dikutip oleh Rusman mengartikan Kurikulum sebagai upaya sekolah untuk mempengaruhi siswa untuk dapat belajar baik dalam ruangan kelas maupun diluar sekolah .

Sanjaya memaknai bahwa kurikulum merupakan serangkaian pengalaman belajar peserta didik, sebagaimana disebutkan oleh para tokoh pendidikan bahwa kurikulum bukan hanya menyangkut mata pelajaran yang harus dipelajari melainkan, menyangkut seluruh usaha sekolah untuk mempengaruhi siswa belajar diruangan maupun diluar kelas atau bahkan diluar sekolah.

Hamid Hasan mengemukakan bahwa konsep kurikulum dapat ditinjau dalam 4 dimensi, yaitu :

1. Kurikulum sebagai suatu ide yang dihasilkan melalui teori-teori dan penelitian, khususnya dalam bidang kurikulum dan pendidikan
2. kurikulum sebagai suatu rencana tertulis, sebagai perwujudan dari kurikulum sebagai suatu ide yang didalamnya memuat tentang tujuan, bahan, kegiatan, alat-alat dan waktu
3. kurikulum sebagai suatu kegiatan, yang merupakan pelaksanaan dari kurikulum sebagai suatu rencana tertulis dalam bentuk praktek pembelajaran

4. kurikulum sebagai suatu hasil yang merupakan konsekuensi dari kurikulum sebagai suatu kegiatan dalam bentuk ketercapaian tujuan kurikulum yakni tercapainya perubahan perilaku atau kemampuan tertentu dari para peserta didik.

## 2.5. Kurikulum 2013

Kurikulum 2013 merupakan serentetan rangkaian penyempurnaan terhadap kurikulum yang telah dirintis tahun 2004 yang berbasis kompetensi lalu diteruskan dengan kurikulum 2006

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (PERMENDIGBUD) No. 69 tahun 2013, kurikulum 2013 bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga Negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif dan efektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan perdaban dunia.

### Standar Kompetensi Lulusan pada kurikulum 2013

<b>Sikap</b>	<b>Pengetahuan</b>	<b>Keterampilan</b>
Menerima	Mengingat	Mengamati
Menjalankan	Memahami	Menanya
Menghargai	Menerapkan	Mencoba
Menghayati	Menganalisa	Menyaji
Mengamalkan	Mengevaluasi	Menalar
-	-	Mencipta

### Karakteristik Langkah penguatan proses pembelajaran pada kurikulum 2013

1. menggunakan pendekatan saintifik melalui mengamati, menanya, mencoba, menalar, membentuk jejaring
2. menggunakan ilmu pengetahuan sebagai penggerak pembelajaran untuk semua mata pelajaran
3. menuntut siswa untuk mencari tahu, bukan diberi tahu (*discovery learning*)
4. menekankan kemampuan berbahasa sebagai alat komunikasi, pembawa pengetahuan dan berfikir logis, sistematis, dan kreatif.

Dalam peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (PERMENDIKBUD) No. 65 tahun 2013. Sesuai dengan standar kompetensi lulusan dan standar isi maka prinsip pembelajaran yang digunakan adalah :

1. Dari peserta didik diberi tahu menjadi peserta didik mencari tahu
2. Dari guru sebagai satu – satunya sumber belajar menjadi belajar berbasis aneka sumber belajar
3. Dari pendekatan tekstual menuju proses sebagai penguatan penggunaan pendekatan ilmiah
4. Dari pembelajaran berbasis konten menuju pembelajaran berbasis kompetensi
5. Dari pembelajaran parsial menuju pembelajaran terpadu
6. Dari pembelajaran yang menekan jawaban tunggal menuju pembelajaran dengan jawaban yang kebenarannya multidimensi

7. Dari pembelajaran verbalisme menuju keterampilan aplikatif
8. Meningkatkan dan keseimbangan antara keterampilan fisikal (*hardskills*) dan keterampilan mental (*softskills*)
9. pembelajaran yang mengutamakan pembudayaan dan Pemberdayaan peserta didik sebagai pembelajaran sepanjang hayat
10. Pembelajaran yang menerapkan nilai – nilai dengan memberi keteladanan (*Ingarso sung tulodo*), membangun kemauan (*ingmadiyo mangun karso*), dan mengembangkan kreatifitas peserta didik dalam proses pembelajaran (Tut wuri Handayani)
11. Pembelajaran yang berlangsung di rumah, disekolah, dan di masyarakat
12. Pembelajaran yang menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, siapa saja adalah siswa dan dimana saja adalah kelas
13. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran
14. pengakuan atas perbedaan individual dan latar belakang budaya peserta didik.

## **2.6. Guru dalam Implementasi kurikulum 2013**

Menurut Undang-Undang No. 14 tahun 2005 pengertian Guru adalah pendidik professional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Menurut Silverius Guru adalah tokoh sentral pendidikan dalam upaya menyiapkan kader bangsa di masa depan, kunci sukses reformasi pendidikan.

Guru dipandang dapat memainkan peran penting terutama dalam membantu peserta didik untuk membangun sikap positif dalam belajar, membangkitkan rasa ingin tahu, mendorong kemandirian dan ketepatan logika intelektual, serta menciptakan kondisi – kondisi untuk sukses dalam belajar. Guru merupakan pihak yang paling utama dalam pentransferan ilmu pengetahuan kepada peserta didik.

Guru merupakan ujung tombak penerapan kurikulum 2013. Guru diharapkan bisa menyiapkan dan membuka diri terhadap beberapa kemungkinan terjadinya perubahan. Guru yang kurang mengembangkan diri atau tidak berkualitas dianggap sulit bisa melahirkan lulusan yang kompeten. Apalagi keberadaan guru tidak bisa digantikan oleh faktor lain sehingga untuk meningkatkan mutu pendidikan, upaya-upaya guru harus selalu dilakukan secara terus menerus

Guru harus kompetensi. Karena kompetensi guru merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya tujuan pembelajaran dan pendidikan disekolah, namun kompetensi guru tidak berdiri sendiri, dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti latar belakang pendidikan, pengalaman mengajar dan lama mengajar. Pengembangan kompetensi merupakan suatu proses konsolidasi dalam memahirkan seperangkat keterampilan yang dibutuhkan untuk mencapai domain kehidupan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen menyatakan bahwa kompetensi adalah seperangkat

pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesional.

Menurut peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan kompetensi guru, ada macam-macam kompetensi yang harus dimiliki oleh guru yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi professional yang diperoleh melalui pendidikan profesi dan keempat kompetensi tersebut terintegrasi dalam kinerja guru.

Sesuai rencana, proses pembelajaran kurikulum 2013 akan diarahkan menjadi pembelajaran yang berpusat pada siswa (*student centered*) bukan lagi berpusat pada guru (*teacher centered*). Jadi kesiapan dan kompetensi guru dilapangan akan menjadi faktor penentu implementasi kurikulum 2013

## **2.7. Pengertian sekolah**

Sekolah adalah tempat didikan bagi anak-anak. Tujuan dari sekolah adalah mengajarkan anak untuk menjadi anak yang mampu memajukan Bangsa. Sekolah adalah sebuah lembaga yang dirancang untuk pengajaran siswa / murid dibawah pengawasan guru.

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (PERMENDIKBUD) No. 3 Tahun 2013 yang merujuk pada Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang SISDIKNAS : jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan. Menurut Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) :



Jenjang pendidikan Formal di Indonesia terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan Tinggi.

### **2.7.1 Jenjang Pendidikan dasar**

Jenjang pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah (jenjang pendidikan paling dasar pada pendidikan formal di Indonesia yang ditempuh dalam waktu 6 Tahun, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Lulusan sekolah dasar dapat melanjutkan pendidikan ke sekolah menengah pertama dan atau sederajat ).

Jenjang pendidikan dasar di Indonesia berbentuk sekolah dasar (SD) dan madrasah Ibtidaiyah (MI) atau berbentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTS), atau berbentuk lain yang sederajat. Di Indonesia pelajar sekolah dasar umumnya berusia sekitar 7 – 12 tahun di Indonesia, setiap warga Negara berusia 7 – 15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar, yakni sekolah dasar (atau sederajat) 6 tahun dan sekolah menengah pertama (atau sederajat) 3 tahun. Untuk belajar di SMP / MTS atau yang sederajat, anak – anak usia SMP dapat memilih sekolah yang sesuai dengan pilihan dan kesempatan yang dimiliki, seperti SMP negeri atau SMP swasta biasa, SD – SMP satu atap, SMP terbuka, MTS negeri atau MTS swasta atau sekolah lainnya yang sederajat, pondok pesantren salavia yang menyelenggarakan program wajib belajar.

### **2.7.2. Jenjang pendidikan menengah**

Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar yang terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan berbentuk

sekolah menengah atas (SMA), Madrasah aliyah (MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), dan madrasah aliyah kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat. Di Indonesia pelajar sekolah pada jenjang pendidikan menengah umumnya berusia sekitar 15 – 18 tahun.

### **2.7.3. Jenjang Pendidikan Tinggi**

Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan dokter yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Pendidikan tinggi diselenggarakan dengan sistem terbuka. Perguruan tinggi dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas.

### **2.8. Kegiatan Pembelajaran**

Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar yang meliputi guru dan siswa yang saling bertukar informasi.

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (PERMENDIKBUD) No. 65 tahun 2013 standar proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada suatu pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Standar proses dikembangkan mengacu pada standar kompetensi lulusan dan standar isi yang telah ditetapkan.

Belajar merupakan kegiatan paling pokok dalam proses belajar – mengajar manusia, terutama dalam pencapaian tujuan institusional suatu lembaga pendidikan atau sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa berhasil tidaknya suatu

pencapaian tujuan pendidikan bergantung pada bagaimana proses belajar – mengajar yang dialami oleh individu.

Menurut pendapat tradisional yang dikutip dari Sadiman dalam buku strategi belajar mengajar (2014:1), belajar adalah menambah dan mengumpulkan sejumlah pengetahuan. Disini yang dipentingkan pendidikan intelektual, dimana anak–anak diberi macam–macam pelajaran untuk menambah pengetahuan yang dimilikinya, terutama dengan jalan menghafal.

Menurut Siahaan dalam buku strategi belajar mengajar (2014:1) berpendapat bahwa belajar adalah suatu bentuk pertumbuhan atau perubahan dalam diri seseorang yang dinyatakan dengan cara tingkah laku yang baru berdasarkan pengalaman dan latihan. Tingkah laku yang baru itu, misalnya dari tidak tahu menjadi tahu, timbulnya pengertian baru, serta timbul dan berkembangnya sifat–sifat sosial dan emosional.

Kegiatan mengajar pada diri siswa akan tercipta jika ada usaha yang diberikan oleh guru, usaha dari pihak ini dikenal dengan usaha mengajar. Menurut Oemar hamalik yang dikutip Nur Hmiyah dan Muhammad Jauhar (2014:5), mengajar diartikan sebagai usaha pemberian bimbingan kepada siswa untuk belajar. Dengan kata lain, menagajar adalah menciptakan lingkungan dan berbagai kemudahan belajar bagi siswa. S. Nasution yang dikutip oleh Nur Hamiyah dan Muhammad Jauhar (2014:5) mengungkapkan bahwa terdapat beberapa hal yang berhubungan dengan kegiatan mengajar, antara lain:

1. Mengajar berarti membimbing aktivitas anak
2. Mengajar berarti membimbing pengalaman anak

3. Mengajar berarti membantu anak berkembang dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya.

Menurut Nur Hamiyah dan Muhammad Jauhar (2014:15-17) Komponen komponen belajar–mengajar :

#### 1. Tujuan Pengajaran

Menurut Roestyah, tujuan pengajaran adalah deskripsi tentang penampilan perilaku siswa yang kita harapkan setelah mereka mempelajari bahan pelajaran yang kita ajarkan. Suatu tujuan pengajaran mengatakan suatu hasil yang kita harapkan dari pengajaran itu dan bukan sekedar proses dari pengajaran itu sendiri.

#### 2. Bahan Pelajaran

Bahan pelajaran adalah substansi yang akan disampaikan dalam proses belajar – mengajar. Bahan pelajaran mencakup bahan pelajaran pokok dan bahan pelajaran pelengkap. Bahan pelajaran pokok adalah bahan pelajaran yang menyangkut bidang studi yang dipegang oleh guru sesuai dengan profesinya. Sedangkan bahan pelajaran pelengkap adalah bahan pelajaran yang dapat membuka wawasan seorang guru.

#### 3. Kegiatan Belajar–Mengajar

Kegiatan belajar–mengajar adalah inti kegiatan dalam pendidikan. Segala sesuatu yang diprogramkan akan dilaksanakan dalam proses belajar–mengajar. Dalam kegiatan belajar–mengajar, guru dan anak didik terlibat dalam sebuah interaksi dengan bahan pelajaran sebagai mediumnya dalam kegiatan ini, anak

didik dibimbing untuk aktif dalam proses belajar sehingga materi yang disampaikan bisa diterima siswa.

#### 4. Metode

Metode adalah suatu cara yang digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam kegiatan belajar – mengajar, diperlukan oleh guru dan penggunaan bervariasi sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Penggunaan metode yang tepat akan mempengaruhi proses belajar serta tujuan yang hendak dicapai di akhir proses belajar.

#### 5. Alat

Alat adalah segala sesuatu yang digunakan untuk mencapai tujuan pengajaran. Sebagai sesuatu yang dapat dipergunakan untuk mencapai tujuan pengajaran, alat mempunyai fungsi, yaitu sebagai perlengkapan dan peralatan untuk mempermudah usaha mencapai tujuan.

#### 6. Sumber belajar

Menurut Sudirman, ada lima sumber belajar, yakni :

- a. manusia
- b. Bahan
- c. Lingkungan
- d. Alat dan Perlengkapan
- e. Aktifitas

## 7. Evaluasi

Evaluasi merupakan suatu tindakan atau proses untuk menentukan nilai dari sesuatu. evaluasi pendidikan sendiri bermakna suatu proses untuk menentukan nilai sebagai sesuatu dalam dunia pendidikan atau segala yang ada hubungannya dengan pendidikan.

